

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pokok bagi negara-negara di dunia terutama negara berkembang seperti Indonesia yang dapat menghambat proses pembangunan perekonomian. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu (Sutikno, Rotinsulu, & Tumangkeng, 2019). Kemiskinan telah ada sejak lama pada hampir semua peradaban manusia. Selain itu, kemiskinan juga merupakan masalah multidimensional yang tidak hanya menyangkut masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial, budaya dan politik (Salayang, Laoh, & Kapantow, 2018).

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan (Yacoub, 2012). Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah yang memiliki jumlah penduduk yang padat terutama di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan karena ada kebanyakan masyarakat yang berasal dari luar daerah Provinsi Jawa Tengah yang datang berdomisili, dengan niat untuk mencari pekerjaan. Namun, hal tersebut tidak semudah yang diharapkan, karena lapangan pekerjaan yang masih kurang, sehingga banyak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan yang berimbas pada kurangnya pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang berdampak terhadap kemiskinan. Untuk mengentaskan kemiskinan, terdapat dua strategi yang harus ditempuh.

Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Royat, 2015).

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Ketika data telah tersedia, maka pemerintah dapat mengambil keputusan apa saja yang harus dilakukan untuk penanggulangan tersebut. Selain itu, data yang tersedia dapat membuat pemerintah membandingkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun (Ferezagia, 2018). Pemerintah perlu mengupayakan berbagai macam solusi pengentasan kemiskinan yang harus dilakukan secara benar, yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu (Sutikno, Rotinsulu, & Tumangkeng, 2019).

Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus segera dilaksanakan secara komprehensif karena kemiskinan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama di Provinsi Jawa Tengah. Tabel 1.1 menyajikan gambaran data pembandingan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2009-2018.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi**  
**Jawa Tengah 2009-September 2018**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah/Total (Ribuan jiwa)</b>	<b>Persentase</b>
2009	5726,40	17,72%
2010	5369,16	16,56%
2011	5317,39	16,20%
2012	4952,06	14,96%
2013	4811,34	14,44%
2014	4561,83	13,58%
2015	4505,78	13,32%
2016	4493,75	13,19%
2017	4197,49	12,23%
2018	3867,42	11,19%

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, BPS

Jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Jawa Tengah mengalami beberapa kali perubahan. Situasi perekonomian yang semakin membaik menyebabkan berkurangnya kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun (Megawati & Sebayang, 2018). Meski kemiskinan setiap tahunnya mengalami penurunan, namun penurunan kemiskinan tidak terlalu signifikan atau cenderung rendah. Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan kebijakan yang diambil pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya. Maka dari itu, masih perlu perhatian dari pemerintah daerah agar jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dapat terus ditekan (Megawati & Sebayang, 2018).

Salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kemiskinan adalah upah minimum, karena tujuan utama ditetapkannya upah minimum yaitu memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kebutuhan pokok, kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha

untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Meningkatnya upah minimum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat. Karena, untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat secara pribadi atau keluarga, rakyat harus melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah bekerja.

Peran pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah sangat diperlukan dalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Dengan pengertian dan pemahaman serta kerja sama dari semua pihak yang terkait dengan hubungan industrial ini, dapat dicapai tujuan bersama yaitu pekerja atau buruh sejahtera, perusahaan berkembang, serta pemerintah dapat menjaga perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik (Kuswantoro & Dewi, 2016).

Dari sisi lain, beberapa ekonom dan para pembuat kebijakan berpendapat bahwa mengurangi dan menghapus peraturan kebijakan upah minimum mampu menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel serta menciptakan daya saing. Para ekonom yang setuju dengan pendapat ini memandang upah minimum menjadi penyebab kekakuan upah, memperlambat penciptaan lapangan kerja, serta berujung pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan (Gindling & Terrell, 2010).

Maka dari itu, upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan yang dapat kita lihat dari berbagai macam pendapat para ahli ekonomi. Tabel 1.2

menyajikan data upah minimum di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2009-2018.

**Tabel 1.2**  
**Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2018**

Tahun	Upah Minimum Provinsi (Rupiah)
2009	575.000
2010	662.000
2011	717.000
2012	765.000
2013	816.000
2014	910.000
2015	1.100.000
2016	1.293.000
2017	1.370.000
2018	1.490.000

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, BPS

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari 575.000 Rupiah pada tahun 2009 menjadi 1.490.000 Rupiah pada tahun 2018. Peningkatan upah minimum ini atas dasar kebijakan pemerintah daerah yang diberlakukan guna memicu minat masyarakat dalam bekerja. Selain itu, ada faktor penting yang sangat berperan dalam meningkatnya upah minimum provinsi yaitu karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka pemerintah mengambil kebijakan dalam peningkatan upah/gaji. Kenaikan upah berarti menaikkan tingkat kesejahteraan pekerja, sehingga upah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan (Putri & Yuliarni, 2013).

Selain upah minimum, faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kemiskinan adalah inflasi. Definsi singkat dari inflasi adalah kecendrungan naiknya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan dari satu atau

dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain (Susanto, Rochaida, & Ulfah, 2017).

Tingginya tingkat inflasi menyebabkan harga barang menjadi lebih mahal sehingga daya beli masyarakat menjadi berkurang. Maka dari itu, inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan yang dapat kita lihat dari berbagai macam pendapat para ahli ekonomi. Tabel 1.3 menyajikan data inflasi di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2009-2018.

**Tabel 1.3**  
**Laju Inflasi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Inflasi (Persen)</b>
2009	3,32
2010	6,88
2011	2,68
2012	4,24
2013	7,99
2014	8,22
2015	2,73
2016	2,36
2017	3,71
2018	2,82

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, BPS

Pada Tabel 1.3, terlihat bahwa laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah setiap tahun mengalami perubahan. Laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,22 persen. Tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan harga barang dan akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Sementara itu, laju inflasi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 2,68 persen. Pada tahun 2015–2018 inflasi berhasil ditekan meski belum begitu stabil. Maka dari itu, untuk mengatasi dampak buruk dari

inflasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan baik fiskal maupun moneter, karena penyebab timbulnya inflasi tersebut bisa berasal dari sektor riil atau sektor moneter, misalnya inflasi yang ditimbulkan akibat tarikan permintaan, inflasi desakan biaya, inflasi impor atau inflasi akibat dari mencetak uang terlalu banyak melebihi kebutuhan atau perekonomian (Adnan, 2013).

Faktor lain yang juga dapat berpengaruh terhadap kemiskinan adalah pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin banyak pilihan bagi manusia untuk hidup lebih sejahtera. Beberapa orang masih menyangkal bahwa pendidikan juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam kesejahteraan. Pemerintah dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan merancang program-program yang berhubungan dengan pendidikan sedemikian rupa sehingga golongan miskin juga dapat ikut menikmatinya, karena hal ini juga dapat menurunkan ketidakmerataan distribusi pendapatan (Rika, Munawaroh, & Puruwita, 2012).

Kualitas pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Maka dari itu, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pendapatan dan pengaruh tersebut akan menurunkan jumlah penduduk miskin (Kuswantoro & Dewi, 2016). Tabel 1.4 menyajikan data rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 2010-2019.

**Tabel 1.4**  
**Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2019**

Tahun	RLS (Tahun)
2010	6,71
2011	6,74
2012	6,77
2013	6,80
2014	6,93
2015	7,03
2016	7,15
2017	7,27
2018	7,35
2019	7,53

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, BPS

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dengan lamanya bersekolah setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Rata-rata lamanya bersekolah tertinggi adalah tahun 2016 sebesar 7,15 tahun. Meski demikian, rata-rata lamanya bersekolah hanya 6,5 tahun atau setara dengan lulusan SD. Hal tersebut akan menyulitkan masyarakat dalam mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Faktor keempat dalam penelitian ini yang diduga mempengaruhi kemiskinan adalah produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja yang rendah merupakan salah satu sumber penyebab kemiskinan. Rendahnya tingkat produktivitas itu sendiri dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, dan dua hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses bagi kelompok miskin menuju pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan kualitas baik (Azami, 2009).



Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja adalah melalui investasi modal manusia. Investasi dalam *human capital* menghasilkan pengembangan teknis, proses-proses produksi dan produk-produk baru, serta meningkatkan efisiensi ekonomi. Sebagaimana perkembangan *physical capital*, *human capital* turut andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi akan mendorong lebih banyak penggunaan *input-input* dan terciptanya kesempatan kerja yang lebih luas (Azami, 2009). Salah satu pilarnya adalah pemberantasan kemiskinan dan peningkatan pencapaian tingkat pendidikan. Perekonomian yang tumbuh dengan baik dapat membawa perubahan struktural dalam penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Tabel 1.5 menyajikan data produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 2009-2019.

Pada Tabel 1.5, nampak bahwa produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami peningkatan, meski tidak begitu signifikan atau masih tergolong rendah. Peningkatan produktivitas yang tergolong rendah menyebabkan tingkat pengangguran masih tinggi, karena pengangguran yang tinggi dan sedikitnya orang yang produktif dalam bekerja berdampak pada kemiskinan yang sulit ditekan karena tidak adanya penghasilan.

**Tabel 1.5**  
**Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2009–2018**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB (Trilyun Rupiah)</b>	<b>Jumlah Orang Bekerja (Orang)</b>	<b>Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah per Orang)</b>
2009	623,22	15.809.447	39,42
2010	656,27	15.822.765	41,48
2011	691,34	16.531.395	41,82
2012	726,66	16.469.960	44,12
2013	764,96	16.550.682	46,22
2014	806,77	16.435.142	49,09
2015	893,75	17.186.674	52,01
2017	941,16	17.245.548	54,57
2018	992,11	17.441.153	56,88

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, BPS (diolah)

Berdasarkan penjelasan di muka, maka penelitian ini akan membahas pengaruh upah minimum, inflasi, pendidikan, dan produktivitas tenaga kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang, diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami penurunan setiap tahun yang dapat dilihat pada Tabel 1.1. Meski demikian, angka kemiskinan masih terbilang tinggi. Hal ini disebabkan oleh upah yang cenderung belum bisa mencukupi kebutuhan yang setiap tahun mengalami kenaikan, sehingga daya beli masyarakat menjadi berkurang.

Selain itu, inflasi juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya yang mengakibatkan harga kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan, terutama memasuki bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri yang membuat inflasi naik karena harga-harga mengalami kenaikan.

Tingkat pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah (RLS) yang masih tergolong rendah dapat dilihat pada Tabel 1.4. Meskipun setiap tahun meningkat, namun rata-rata lamanya bersekolah hanya 6,5 tahun atau setara dengan lulusan SD. Hal tersebut akan mempersulit masyarakat dalam mencari pekerjaan dikarenakan sulitnya bersaing dalam dunia kerja karena pendidikan yang rendah.

Produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah juga belum stabil. Tabel 1.5 menunjukkan angka produktivitas tenaga kerja setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun peningkatan yang tergolong rendah menyebabkan tingkat pengangguran masih tinggi. Pengangguran yang tinggi dan sedikitnya orang yang produktif dalam bekerja berdampak pada kemiskinan yang sulit ditekan karena tidak adanya penghasilan.

Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh upah minimum, inflasi, pendidikan dan produktivitas tenaga kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian pertanyaan yang dapat dirumuskan pada penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?

4. Bagaimana pengaruh produktivitas tenaga kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi pengaruh upah minimum, inflasi, pendidikan dan produktivitas tenaga kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

#### **2. Kegunaan penelitian**

1. Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur tentang tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Dapat memberikan dan menambah pengetahuan baru mengenai pengaruh jumlah penduduk miskin, upah minimum, inflasi, pendidikan dan produktivitas tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, dengan rincian pembahasan sebagai berikut:

##### **Bab I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **Bab II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori dan penelitian terdahulu/studi terkait mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

##### **Bab III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode analisis, dan berbagai uji yang akan digunakan dalam penelitian ini.

##### **Bab IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian tentang hasil perhitungan dari analisis data dan pembahasan berdasarkan pada rumusan masalah yang ada.

##### **Bab V: PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran berupa masukan yang dapat digunakan untuk pemerintah dan untuk peneliti selanjutnya.